

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau daerah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

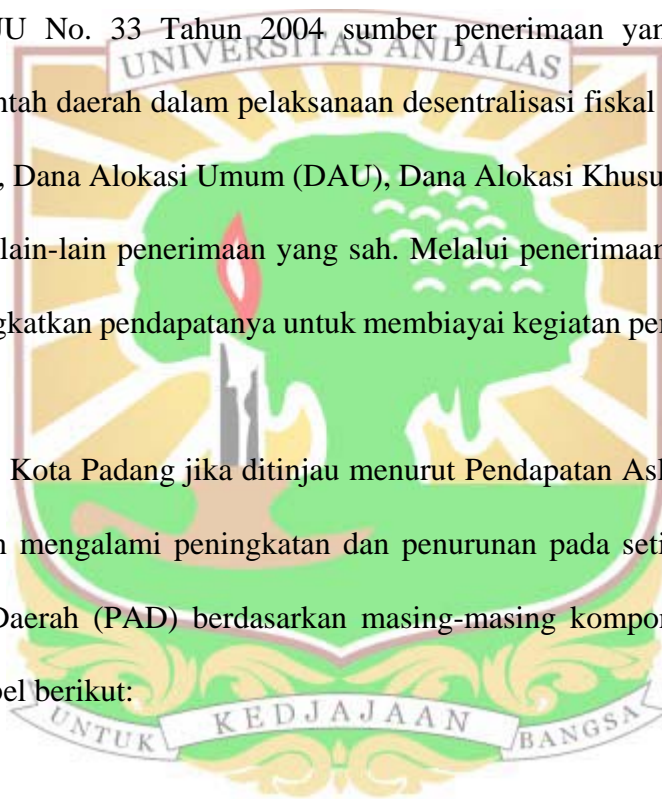
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat meratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Upaya pemerintah

meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diperlihatkan melalui perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan perlu memperhatikan aspek potensi yang ada di daerah, melalui kondisi masyarakatnya serta melihat hubungannya terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan perencanaan daerah dibutuhkan sumber penerimaan untuk menunjang terselenggaranya pembangunan daerah. Sehubungan dengan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai aktivitas pemerintahan melalui penggalan kekayaan asli daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain penerimaan yang sah. Melalui penerimaan, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatannya untuk membiayai kegiatan pembangunan terutama dibidang ekonomi.

Pendapatan Kota Padang jika ditinjau menurut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan masing-masing komponennya seperti yang tergambar pada tabel berikut:



**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2004-2014**  
**(Rp.Juta)**

Tahun	PAD				Total PAD
	Pajak	Retribusi	Hasil Perusahaan Milik Daerah	Pendapatan Lain-lain	
2004	47.818,66	15.596,22	4.341,88	889,80	68.646,57
2005	58.647,19	23.449,59	3.645,29	1.519,51	87.261,58
2006	63.586,17	21.378,62	3.698,53	9.882,88	98.546,20
2007	68.375,22	21.565,47	3.308,21	11.621,12	104.870,42
2008	76.795,69	24.793,29	3.788,86	12.351,04	117.728,89
2009	71.666,75	21.898,30	4.741,73	15.011,62	113.318,41
2010	77.693,34	21.985,78	5.293,73	11.772,43	116.691,28
2011	102.412,44	23.457,00	8.996,69	15.008,67	149.874,80
2012	128.595,98	30.325,98	8.403,53	22.126,22	189.450,84
2013	165.460,99	39.409,96	8.415,72	25.585,22	238.871,89
2014	194.620,52	55.736,71	8.415,72	54.489,56	315.678,80

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang*

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya dari total PAD sejak tahun 2004-2014. Hal ini menggambarkan bahwa PAD Kota Padang mengalami pertumbuhan yang semakin baik pada lima tahun terakhir meski sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil perusahaan milik daerah, serta pendapatan lain-lain. Pajak memiliki kontribusi yang paling besar dan selalu mengalami peningkatan hampir pada setiap tahunnya. Sedangkan Retribusi berada pada urutan kedua yang memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah kota Padang dibandingkan dua komponen lainnya yaitu Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pendapatan Lain-lain. Meski demikian kontribusi Pendapatan lain-lain memiliki kontribusi yang cukup baik dibandingkan Hasil Perusahaan Milik Daerah, hal ini menggambarkan

bahwa pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Berikut tabel 1.2 menunjukkan pendapatan daerah jika ditinjau berdasarkan Dana Perimbangan yang mencakup dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Padang pada tahun 2004-2014:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Dana Perimbangan Kota Padang Tahun 2004 – 2014**  
**(Rp.Juta)**

Tahun	Dana Perimbangan			Total
	DAU	DAK	DBH	
2004	272.154,00	5.580,00	27.571,42	320.866,22
2005	287.033,00	12.630,00	32.668,50	353.263,05
2006	503.906,00	56.050,00	40.094,28	622.801,90
2007	565.100,00	32.293,80	56.973,65	677.797,35
2008	624.642,09	12.351,04	58.870,43	754.710,66
2009	628.472,62	45.463,00	58.882,84	732.818,46
2010	632.117,46	43.515,50	65.411,50	741.044,46
2011	711.416,06	53.443,10	63.302,31	828.149,46
2012	871.875,67	64.122,76	10.587,38	1.044.585,81
2013	1.003.110,09	82.841,80	57.718,07	1.142.675,96
2014	1.060.917,65	57.262,40	64.110,86	1.182.290,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Tergambar dari tabel 1.2 pada tiga tahun terakhir realisasi Dana Perimbangan Kota Padang mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi terbesar pada Dana Perimbangan Kota Padang pada setiap tahunnya, dan selalu mengalami peningkatan. Jika pengalokasian Dana Alokasi Umum dilakukan dengan baik akan mampu membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah nantinya, dengan lebih fokus pada pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah setelah otonomi daerah dituntut untuk dapat membiayai diri sendiri melalui sumber keuangan yang dikuasai dan kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan

fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah, guna terpenuhinya pembangunan ekonomi daerah.

Maka berdasarkan uraian yang tergambar pada PAD dan Dana Perimbangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pajak, Retribusi, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2004-2014”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan dua komponen sumber Pendapatan Asli Daerah bagaimana pengaruhnya Pajak dan Retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2004-2014?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2004-2014?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sumber Pendapatan Asli Daerah pada komponen Pajak dan Retribusi bagi pertumbuhan ekonomi kota Padang pada tahun 2004-2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2004-2014.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, bagi Instansi Pemerintahan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan dan bahan acuan dalam rangka upaya peningkatan keuangan pemerintahan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai keuangan daerah terkait dua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada komponen pajak daerah

dan retribusi daerah serta Dana Alokasi Umum dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian di Kota Padang, dengan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), dan variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Alokasi umum. Dengan periode analisis pada tahun 2004-2014.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasan terbagi atas beberapa bab dan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori dan studi literatur yang terkait dengan definisi otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto, dalam penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi penulis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

#### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode pengumpulan data, sumber data dan metode pengolahan data yang akan digunakan dalam melakukan analisis bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum bagi pertumbuhan ekonomi.

#### **BAB IV      GAMBARAN UMUM KOTA PADANG**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Padang yang meliputi kondisi geografis dan penduduk, perkembangan PAD dan Dana Perimbangan serta perkembangan PDRB Kota Padang.

#### **BAB V        HASIL DAN KAJIAN EMPIRIS**

Bab ini menjelaskan hasil analisis terhadap faktor atau karakteristik yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan pengolahan data menggunakan metode regresi berganda.

#### **BAB VI      PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian berdasarkan pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum di Kota Padang bagi pertumbuhan ekonomi.

